

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Manajemen Pendidikan Perguruan Tinggi

Awal perkembangan ilmu manajemen ditandai dengan lahirnya buku *The Principle of Scientific Management* (1911) yang ditulis oleh Frederick W. Taylor. Taylor bereksperimen tentang teori *time and motion* menggunakan ban berjalan. Dari ujicoba tersebut lahirlah teori efisiensi dan efektifitas⁹. Namun dalam prakteknya, para ahli berbeda-beda pendapat tentang pendefinisian manajemen.

Manajemen dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan perencanaan, kegiatan pengorganisasian, kegiatan pelaksanaan atau kegiatan menggerakkan, dan kegiatan pengawasan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya.¹⁰ Selain itu, manajemen juga dapat didefinisikan sebagai suatu seni tentang bagaimana mengorganisasikan, menyusun, mengolah, dan mengawasi sumber daya yang dimiliki oleh organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut.¹¹ Manajemen sering pula diartikan sebagai “pengelolaan”. Kata pengelolaan sendiri dapat diartikan dengan banyak hal tergantung cara pandang individu yang mengartikannya. Salah satu teori menyebutkan bahwa pengelolaan adalah kekuatan untuk menguasai atau mengendalikan bisnis. Kekuatan ini akan menentukan berhasil

⁹T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2003), 42.

¹⁰ George R. Terry, *Azas-Azas Manajemen*, (Bandung : Alumni, 1986), 4.

¹¹ Manullang M., *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta : Gajah Mada, 2001), 5.

tidaknya sebuah bisnis yang dilakukan. Dengan kata lain bahwa pengelolaan adalah kegiatan perencanaan dan implementasi.¹²

Dalam dunia pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Hampir semua perguruan tinggi merupakan organisasi yang tidak mencari keuntungan finansial semata (nirlaba). Sehingga pengaplikasian dilapangan sedikit berbeda dengan penerapan manajemen bisnis. Proses perencanaan di perguruan tinggi meliputi kegiatan perencanaan 5 (lima) tahunan dan juga perencanaan tahunan. Perencanaan juga mencakup perencanaan strategis seperti penentuan visi, misi, tinjauan lingkungan dan sebagainya. Penerapan fungsi pengorganisasian merupakan kegiatan pengorganisasian sumber daya manusia termasuk rekrutmen dan penempatannya. Penggerakkan yang dilakukan di perguruan tinggi merupakan tugas untuk menggerakkan seluruh sumber daya manusia yang dimiliki agar dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas yang telah ditentukan oleh organisasi. Setiap individu mampu melakukan pekerjaan yang telah dibebankan kepadanya dengan penuh semangat dan kemampuan melakukan pekerjaan secara maksimal. Fungsi terakhir adalah proses pengawasan. Pengawasan merupakan penilaian terhadap pelaksanaan dan hasil kerja yang telah dilakukan melalui kegiatan pengamatan dan pengukuran dari pekerjaan tersebut. Membandingkan apakah pelaksanaan dan keluaran hasil pekerjaan yang telah dilakukan sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau belum.¹³

¹² Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto, *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*, (Yogyakarta : Preinexus, 2016), 19.

¹³ Ibid, 30-32.

Salah satu kegiatan pengelolaan yang sangat penting dilakukan di perguruan tinggi adalah manajemen pengetahuan (*knowledge management*).

Dengan melakukan kegiatan manajemen pengetahuan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomis dan mendatangkan tambahan nilai ekonomis pula¹⁴. Beberapa proses yang dapat dilakukan dalam rangka manajemen pengetahuan adalah 1) menciptakan pengetahuan baru; 2) mengakses pengetahuan dari sumber eksternal; 3) menyimpan pengetahuan dalam bentuk dokumen, database, perangkat lunak atau perangkat digital lainnya; 4) mengimplementasikan pengetahuan dalam proses, produk dan jasa; 5) melakukan transfer pengetahuan yang dimiliki; 6) menerapkan pengetahuan dalam proses pengambilan keputusan; 7) mengembangkan budaya dan insentif terhadap pengetahuan; dan 8) memberikan penilaian terhadap pengetahuan dan dampaknya terhadap organisasi.¹⁵

Salah satu penerapan dari manajemen pengembangan adalah menciptakan pengetahuan baru. Pengetahuan baru dapat dihasilkan dari sebuah penelitian. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan. Pendidikan di perguruan tinggi dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi besar untuk menguatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan perguruan tinggi ditandai dengan banyaknya produk unggulan berbasis teknologi hasil penelitian dan pengembangan yang dihasilkan oleh industri atau perusahaan mendapat dukungan dari lembaga penelitian dan

¹⁴ Ibid, 36.

¹⁵ Galagan dalam Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto, *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*, (Yogyakarta : Preinexus, 2016), 36.

pengembangan perguruan tinggi (LPNK, LPK, Badan Usaha, dan lembaga dibawah naungan Perguruan Tinggi lainnya). Keberhasilan tersebut juga ditandai dengan produk sumber daya manusia yang terampil lulusan pendidikan tinggi. Sehingga secara garis besar, tujuan dari penelitian di perguruan tinggi adalah :

- a. Menghasilkan penelitian sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik
- c. Meningkatkan kapasitas penelitian
- d. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia
- e. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional.¹⁶

Implementasi kebijakan penelitian yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebijakan umum penelitian yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) Depdiknas atau Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) Kemenag. Disamping itu, perguruan tinggi juga menetapkan kebijakan sendiri terutama lembaga/individu pelaksana penelitian yang melaksanakan kegiatan penelitian. Pelaksana penelitian dapat berasal dari lembaga penelitian, departemen/jurusan/prodi atau dosen secara individu atau kelompok. Kebijakan penelitian perguruan tinggi memprioritaskan pilar peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan.

¹⁶ *Panduan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018*, (Jakarta : Kemenristek Dikti, 2018), 2.

Seiring dengan kebijakan pemerintah yang berorientasi pada penelitian dan *research*, maka secara otomatis karya-karya yang dihasilkan juga semakin berkembang. Semakin banyaknya karya ilmiah yang dihasilkan berdampak pada ruang penyimpanan, pelestarian dan sekaligus pendistribusian karya ilmiah tersebut. Sebagai salah satu alternatif untuk penyimpanan dan pelestarian karya-karya tersebut adalah dengan cara mengalih-bentuk karya-karya tersebut dalam bentuk digital.

Dalam kaitan penghimpunan dan pelestarian karya-karya ilmiah kedalam bentuk digital (*self archiving*), perpustakaan mempunyai peranan penting dalam melakukan deposit karya ilmiah. Perpustakaan merupakan lembaga yang mempunyai tugas untuk mengelola koleksi hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam. Proses pengelolaan koleksi-koleksi tersebut dilakukan secara profesional untuk memenuhi kebutuhan pemustaka dalam bidang pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka menggunakan sistem yang baku.¹⁷ Perpustakaan harus mengembangkan pengelolaan (manajemen) yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Salah satunya adalah pengelolaan koleksi berbasis *digital content* yang berisi tentang karya-karya ilmiah yang dimiliki oleh lembaganya.

B. Manajemen Repository Institusi

Repository institusi (*institutional repository*) merupakan usaha yang dilakukan oleh sebuah komunitas dalam menghimpun dan melestarikan hasil karya komunitas tersebut sebagai cara untuk menciptakan kerjasama, pertukaran

¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, Pasal 1 point 1.

dan penyebaran informasi guna memperlancar komunikasi ilmiah didalam komunitas tersebut¹⁸. Perguruan tinggi merupakan salah satu lembaga yang banyak menghasilkan karya ilmiah. Hal ini merupakan perwujudan dari salah satu tri dharma perguruan tinggi yaitu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Akan tetapi, tidak semua karya ilmiah yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dapat diakses atau ditelusur dengan baik. Salah satu penyebab susahya mengakses karya ilmiah tersebut adalah karena tidak terdepositkannya karya-karya tersebut secara baik. Bahkan karya-karya tersebut cenderung diabaikan dan tidak dikelola sebagaimana mestinya. Padahal karya ilmiah tersebut dapat dijadikan sebagai literatur dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang.

Dalam surat edaran Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomer 2050/E/T/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang kebijakan unggah karya ilmiah dan jurnal disebutkan bahwa “perguruan tinggi dan pengelola jurnal wajib mengunggah karya ilmiah mahasiswa dan dosen sebagai upaya untuk menegakkan komitmen membangun karakter dan meningkatkan kualitas dosen”¹⁹. Kebijakan publikasi ilmiah ini juga berhubungan erat dengan upaya pencegahan plagiarisme dengan asumsi bahwa sebuah karya ilmiah akan diketahui terindikasi plagiat atau tidak jika dapat dibandingkan dengan karya ilmiah lain yang sudah diterbitkan. Karya-karya ilmiah yang akan dihasilkan dapat dibandingkan dengan karya-karya ilmiah yang telah dipublikasikan melalui media-media berbasis online.

¹⁸ Wiji Suwarno, “Memperbincangkan Penerapan Open Acces untuk Koleksi Institusional Repository”, Jurnal Libraria, Vol 2 No. 1 (2014), 20-21.

¹⁹ Surat edaran kemenristek dikti nomer 2050/E/T/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang kebijakan unggah karya ilmiah dan jurnal.

Perkembangan media berbasis online mempunyai dampak yang hebat terhadap perubahan di segala bidang. Tidak terkecuali layanan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus dapat memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut untuk meningkatkan mutu layanan kepada civitas akademika. Salah satunya adalah layanan di bidang preservasi karya ilmiah. Layanan tersebut bisa berupa layanan jurnal online, digital library dan juga repository institusi.

Repository institusi dapat berkembang pesat karena adanya fenomena *Open Archive Initiative* (OAI). Fenomena ini muncul pada tahun 90-an. Pelopor dari kegiatan OAI ini adalah ilmuwan dari universitas di Eropa. Mereka mempunyai kebiasaan menyimpan karya-karya ilmiah mereka di komputer lokal departemen. Bidang karya ilmiah yang di kembangkan awalnya hanya bidang komputer dan ekonomi saja. Setelah diperkenalkannya protokol untuk *harvesting*, maka muncullah kesepakatan untuk saling bertukar deposit karya yang mereka miliki. Pada awalnya pertukaran hanya terjadi antar departemen di sebuah universitas. Namun dalam perkembangannya, tukar menukar deposit karya ilmiah terjadi antara universitas satu dengan lainnya. Dari sinilah muncul konsep untuk membangun sebuah *Institutional Repository* (simpanan lembaga).

1. Perencanaan Repository

Perencanaan dapat diartikan sebagai proses mendasar yang digunakan sebagai cara untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Perencanaan berkaitan erat dengan upaya pencapaian tujuan organisasi dengan menggunakan *human resources* (Sumber Daya Manusia), *natural resources* (Sumber Daya Alam), dan juga sumber daya lainnya yang dimiliki oleh

organisasi (Siswanto: 2016). Perencanaan juga merupakan penemuan fakta dan mengkoneksikan dengan fakta-fakta yang ada untuk membuat rumusan aktivitas yang diusulkan agar tercapai hasil atau tujuan yang diinginkan²⁰. Jadi perencanaan dapat diartikan sebagai usaha untuk mencapai tujuan dengan menggali fakta-fakta yang ada sehingga dapat membuat rumusan kegiatan yang melibatkan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi.

Dalam membangun dan mengelola repository institusi, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan agar repository institusi ini nantinya tetap eksis dan berjalan dengan baik. Persiapan yang perlu dilakukan diantaranya adalah sarana dan prasarana pendukung seperti hardware dan software komputer, perangkat jaringan dan infrastruktur lainnya. Selain sarana dan prasarana, lembaga juga harus menyiapkan legal formal terkait deposit karya ilmiah. Hal ini sangat penting untuk memberikan payung hukum yang jelas terhadap repository institusi yang dibangun dan juga berkaitan erat dengan wewenang serta tanggung jawab pengelolaan repository institusi. Dengan adanya legal formal ini, pengelola dapat mengelola dan mengembangkan repository institusi dengan baik. Serta yang terakhir adalah mempersiapkan sumber daya manusia pengelola repository institusi. Dengan adanya sumber daya manusia pengelola yang berkompeten, maka repository institusi dapat berjalan dengan baik.

Kegiatan pengelolaan repository institusi adalah perwujudan dari perpustakaan digital yang mengkhususkan diri dalam pengelolaan koleksi lokal (*local content*) dan koleksi literatur kelabu (*grey literatur*). Kegiatan

²⁰ Terry dalam Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2016), 42.

repository meliputi kegiatan menghimpun dan melestarikan koleksi sesuai dengan nilai-nilai kepustakawanan. Koleksi yang dihimpun dan dilestarikan merupakan karya intelektual yang dihasilkan oleh komunitas tertentu²¹. Kegiatan repository mempunyai 3 (tiga) fokus kegiatan yaitu 1) mengumpulkan karya intelektual yang dihasilkan oleh civitas akademika universitas; 2) menyebarkan atau melayankan koleksi tersebut; dan 3) memastikan bahwa koleksi-koleksi tersebut dapat terus di akses selama mungkin (*digital preservation*)²².

Secara garis besar, perencanaan yang harus dilakukan dalam mengelola repository lembaga adalah :

- a. Studi banding (*Banchmarking*) dengan pengelola repository lembaga lain.
- b. Perencanaan terhadap Sumber Daya Manusia pengelola repository lembaga.
- c. Perencanaan sarana dan prasarana pendukung seperti perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer dan lain sebagainya.
- d. Prosedur pelaksanaan pengelolaan repository lembaga termasuk dukungan pimpinan terhadap repository lembaga.
- e. *Content Management* yaitu pengelolaan terhadap isi repository lembaga untuk menjaga keberlangsungan repository itu sendiri.²³

²¹ Putu Laxman Pendit, *Perpustakaan Digital : dari A sampai Z*, (Jakarta : Sagung Seto, 2007), 139.

²² Yanto, "Pengelolaan Institutional Repository Perpustakaan Perguruan Tinggi (Studi Kasus di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)", (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013), 20.

²³ Sutejo dalam Sri Ati Suwanto, "Manajemen Layanan Repository Perguruan Tinggi", *Jurnal Lentera Pustaka*, 3 (2, 2017), 172.

2. Pengorganisasian Repository

Pengorganisasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan kinerja karyawan agar mampu memberikan kontribusi yang maksimal terhadap perkembangan organisasi dan juga sebuah upaya untuk memotivasi karyawan agar dapat bekerja dengan segenap kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya agar tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Hasibuan : 2001). Organisasi sendiri dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang bersepakat untuk melakukan interaksi antara satu dengan lainnya dan melakukan kerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama (Siswanto, 2016 : 73).

Dalam sebuah pengorganisasian diperlukan adanya struktur organisasi yang berfungsi sebagai pembatasan dalam sebuah organisasi. pembatasan berkaitan dengan susunan dan hubungan antara bagian satu dengan bagian lainnya serta posisi dalam perkumpulan²⁴. Gibson (1980) melakukan penekanan pada struktur yang bertalian melalui hubungan yang cenderung pasti yang terdapat diantara pekerjaan dan organisasi. Hubungan yang pasti tersebut muncul karena adanya keputusan tentang pembagian kerja, departementalisasi, rentang kendali dan delegasi²⁵.

Dalam pengorganisasian dikenal beberapa bentuk organisasi yang banyak diterapkan yaitu organisasi garis, organisasi fungsional, dan organisasi garis dan staf. Organisasi garis menerapkan konsep yang bersifat vertikal dimana semua perintah, kebijakan, aturan dan petunjuk berasal dari

²⁴ Stoner dan Wankel dalam Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2016), 85.

²⁵ Gibson dalam Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2016), 85.

atas ke bawah. Organisasi garis merupakan hirarki paling simpel dan banyak digunakan²⁶. Ciri organisasi garis ini adalah adanya kesatuan pimpinan dan adanya hirarki kekuasaan yang jelas²⁷. Sedangkan organisasi fungsional adalah organisasi yang berkonsep pada penempatan pelaksanaan pekerjaan secara terpisah dan setiap bagian memiliki tanggung jawab masing-masing²⁸. Ciri dari organisasi fungsional adalah adanya pemisahan antara pimpinan bagian perencanaan dan pelaksana tugas, adanya hubungan langsung antara perencana dengan pelaksana, dan adanya pembagian tugas pimpinan yang berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan pekerjaan. Dan yang terakhir adalah organisasi garis dan staf yang merupakan gabungan antara organisasi garis dan organisasi fungsional²⁹.

Dalam konteks pengelolaan koleksi, pengorganisasian dapat diartikan sebagai pengelompokan koleksi bahan pustaka dengan berpedoman pada tingkat kesamaan koleksi dan sekaligus juga memilah koleksi berdasarkan perbedaan subyek yang dimiliki oleh bahan pustaka. Proses pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan proses temu kembali koleksi dan juga memudahkan pengguna koleksi untuk menemukan koleksi yang dibutuhkan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan pengelompokan koleksi bahan pustaka dan karya ilmiah. Salah satunya adalah sistem pengelompokan koleksi menggunakan sistem *Dewey Decimal Classification* (DDC). DDC membagi disiplin ilmu kedalam sistem

²⁶ Irham Fahmi, *Manajemen : Teori, kasus, dan solusi*, (Bandung : Alfabeta, 2012), 32.

²⁷ Faisal Afif dalam Irham Fahmi, *Manajemen : Teori, kasus, dan solusi*. (Bandung : Alfabeta, 2012), 32.

²⁸ Irham Fahmi, *Manajemen : Teori, kasus, dan solusi*, (Bandung : Alfabeta. 2012), 33.

²⁹ Ibid, 33-35.

persepuluhan. Secara garis besar, pembagian disiplin ilmu kedalam persepuluhan DDC pada ringkasan pertama adalah sebagai berikut :

| | |
|-----|-----------------------------|
| 000 | Karya umum |
| 100 | Ilmu filsafat dan Psikologi |
| 200 | Agama-agama |
| 300 | Ilmu-ilmu Sosial |
| 400 | bahasa |
| 500 | Ilmu-ilmu Murni (eksakta) |
| 600 | Ilmu-ilmu terapan |
| 700 | Kesenian dan Olahraga |
| 800 | Kesusasteraan |
| 900 | Geografi dan sejarah |

Dari ringkasan pertama tersebut akan dibagi lagi menjadi ringkasan persepuluhan lagi yang disebut sebagai devisi atau ringkasan kedua. Contoh dalam ringkasan pertama kelas 600 akan dibagi lagi menjadi devisi (ringkasan kedua) seperti di bawah ini :

| | |
|-----|--|
| 600 | Teknologi |
| 610 | Ilmu Kedokteran |
| 620 | Ilmu Teknik |
| 630 | Ilmu Pertanian |
| 640 | Kesejahteraan Rumah Tangga |
| 650 | Tatalaksana |
| 660 | Industri dan Teknologi Kimia |
| 670 | Pengolahan Bahan Industri dalam Pabrik |
| 680 | Industri-industri lain |
| 690 | Bangunan |

Dari devisi yang sudah ditentukan diatas, akan dibagi lagi dalam ringkasan persepuluhan yang disebut sebagai seksi atau ringkasan ketiga. Misalkan saja pada kelas 610 (ilmu kedokteran) akan dibagi menjadi :

| | |
|-----|---------------------------------------|
| 610 | Ilmu Kedokteran |
| 611 | Anatomi Manusia |
| 612 | Fisiologi Manusia |
| 613 | Ilmu Kesehatan Umum |
| 614 | Kesehatan Masyarakat |
| 615 | Farmakologi dan ilmu-ilmu obat-obatan |
| 616 | Penyakit |
| 617 | Ilmu Bedah |
| 618 | Cabang ilmu kedokteran yang lain |
| 619 | Ilmu kedokteran hewan |

Seksi-seksi yang ada dalam klasifikasi *Dewey Decimal Classification* dapat diperinci lagi menjadi sub-sub seksi. Untuk memudahkan dalam pengklasifikasian, DDC mengeluarkan buku panduan klasifikasi yang menjadi standart internasional pengelolaan koleksi bahan pustaka dan karya ilmiah³⁰.

Jadi, dalam pengelolaan repository lembaga diperlukan pengorganisasian yang meliputi pengorganisasian Sumber Daya Manusia (*Human Resources*) dan pengorganisasian koleksi (*deposit resources*) menggunakan sistem baku yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan resources tersebut untuk mencapai tujuan repository yang telah ditetapkan oleh lembaga masing-masing.

3. Pelaksanaan Repository

Pelaksanaan repository lembaga identik dengan bagaimana melayani koleksi yang dimiliki oleh repository lembaga. Manajemen

³⁰ <http://perpus.uinjkt.ac.id/content/organisasi-koleksi>, Diakses pada 24 September 2019.

layanan dapat dikategorikan dalam beberapa hal, yaitu a) Kerangka layanan kerja; b) Deposit yang dimediasi; dan c) Komunikasi masa.³¹

a. Kerangka layanan kerja

Kerangka kerja berkaitan dengan garis-garis besar pelaksanaan kerja pada bagian repository. Salah satunya adalah pendelegasian petugas dalam pengelolaan repository lembaga. Dengan adanya pendelegasian ini, petugas dapat berkonsentrasi penuh terhadap pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Selain itu perlu juga adanya kerangka kerja pada bagian layanan repository. Dalam melaksanakan kerja, petugas membutuhkan dasar untuk melaksanakan pekerjaan. Sehingga perlu disusun kebijakan, regulasi dan prosedur kerja bagian repository. Regulasi sangat penting dalam repository karena berkaitan dengan hasil karya ilmiah. Misalkan saja regulasi dan kebijakan terhadap karya ilmiah yang memiliki paten atau keinginan pengarang terhadap pembatasan akses terhadap karya ilmiah yang dihasilkannya. Kebijakan pimpinan juga diperlukan pengelola repository agar petugas dapat melaksanakan tugas pelayanan dan juga pengembangan repository lembaga yang dikelolanya.

b. Deposit yang dimediasi

Yang dimaksud dengan deposit yang dimediasi adalah adanya mediasi yang dilakukan pimpinan lembaga dalam menentukan karya-karya ilmiah yang dapat dideposit ke dalam repository dengan kesesuaian syarat yang telah ditentukan. Dengan adanya deposit yang dimediasi ini, pengelola repository dapat melaksanakan kegiatan deposit karya ilmiah atas nama

³¹ Armstrong dalam Sri Ati Suwanto, "Manajemen Layanan Repository Perguruan Tinggi", Jurnal Lentera Pustaka, 3 (2, 2017), 170-171.

penulis. Keuntungan yang didapat dari deposit yang dimediasi ini, penulis tidak perlu ribet dengan urusan metadata, format karya ilmiah dan proses upload karya ilmiah. Dilain sisi, bagi pengelola repository tidak perlu diribetkan dengan persoalan hak cipta dan kontrol kualitas karya ilmiah yang diupload. Namun demikian, deposit yang dimediasi ini memerlukan infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi.

c. Komunikasi masa

Joseph Pine dalam Suwanto (2017, 171) menyampaikan bahwa perlu adanya proses yang memanfaatkan variasi dan fleksibilitas yang didorong oleh teknologi terbaru dan pendekatan modular. Hal ini bertujuan untuk menawarkan produk yang bersifat unik berdasarkan kebutuhan individu. Dalam hal ini adalah pencari informasi dan juga peneliti. Dengan adanya komunikasi seperti ini, maka produk yang ditawarkan akan memiliki potensi besar dalam menjaring konsumen.

4. Kontrol dan Evaluasi Repository

Controlling dapat diartikan sebagai serangkaian proses mengamati kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dan menilai apakah kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sudah sesuai dengan perencanaan atau belum. *Controlling* juga dapat diartikan sebagai usaha untuk mencari informasi terhadap penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan³². Sedangkan evaluasi dapat diartikan sebagai proses menentukan nilai untuk

³² <https://www.belajarakuntansionline.com/pengertian-controlling-dalam-manajemen/>, Diakses pada 1 Oktober 2019.

suatu hal atau objek yang berdasarakan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu³³. Jadi proses kontrol dan evaluasi adalah dua hal yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Evaluasi merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan kontrol terhadap suatu pekerjaan.

Perkembangan repository itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Setidaknya ada 8 (delapan) faktor yang mempengaruhi yaitu *mandates, integration with planning, funding model, relationship with digitization centres, interoperability, measurement, promotion,* dan *preservation strategy*³⁴. *Mandates* berkaitan erat dengan dukungan dan legitimasi dari manajer dari perguruan tinggi. *Integration with planning* adalah adanya keterkaitan antara pengelolaan repository dengan perencanaan program kerja dari lembaga tempat repository bernaung. *Funding model* berarti adanya pendanaan rutin dan jelas agar terselenggaranya repository dengan baik. *relationship with digitization centres* merupakan keterkaitan dengan proses kegiatan digitalisasi yang dilakukan oleh lembaga. *Interoperability* yang dimaksudkan disini adalah keterbukaan akses terhadap koleksi-koleksi yang ada didalam repository institusi. *Measurement* merupakan kegiatan evaluasi dan pengukuran terhadap peningkatan jumlah koleksi yang dimiliki oleh repository institusi. *Promotion* adalah keberadaan proses promosi yang dilakukan untuk partisipasi terhadap repository institusi. *Preservation strategy* merupakan keterjaminan repository dimasa yang akan datang. Terutama terhadap akses dan deposit karya intelektual.

³³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Evaluasi>, Diakses pada 1 Oktober 2019.

³⁴ Mary Westell dalam Yanto, "Pengelolaan Institutional Repository Perpustakaan Perguruan Tinggi (Studi Kasus di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)", (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013), 23.

Keberhasilan repository tidak lepas dari peranan yang berasal dari internal lembaga seperti pengelolaan konten dan servis atau layanan yang diberikan oleh repository institusi. Selain itu, ada faktor dari eksternal yaitu pengaruh positif repository bagi lembaga. Selain kedua faktor tersebut, ada 4 (empat) komponen penting lainnya yang berpengaruh terhadap kualitas layanan repository institusi. Keempat komponen tersebut adalah 1) *Institutionally Defined* (kebijakan lembaga/institusi); 2) *Scholarly Content* (Konten ilmiah); 3) *Interoperability* (kemudahan akses); dan 4) *Open Acces* (keterbukaan akses)³⁵. Keempat komponen inilah yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur terhadap keberhasilan repository institusi.



³⁵ Raym Crow dalam Yanto, "Pengelolaan Institutional Repository Perpustakaan Perguruan Tinggi (Studi Kasus di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)", (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013), 20.